



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 7, No. 1, 2021 (150-169)

Politik Identitas Islam Studi Perilaku Pemilih Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2019

Oleh: Mukayat Al Amin

mukayatalamin@um-surabaya.ac.id

Abstract

The 2019 Presidential Election in Indonesia was considered highly tense and had the potential to trigger conflicts among fellow countrymen. The argumentation involves two crucial aspects. Firstly, with only two pairs of candidates, namely Jokowi-Ma'ruf Amin and Prabowo-Sandiaga Uno, it led to a division among Indonesian voters due to the lack of alternative choices. Secondly, religious identity politics played a strong role in the 2019 Presidential Election campaign, deemed capable of threatening national unity. This paper analyzes the practice of identity politics in the 2019 Presidential Election using identity theory. The research highlights the social history of Islam and the politics of identity developed by Islamic political parties in the Paciran Sub-district, Lamongan. Additionally, the study also explores the political identity contestation within Islamic political parties in competing for Muslim voters in the sub-district. The results indicate that a long history of identity struggles has occurred in Paciran Village, and this ongoing contest is produced by community agents and structures to win candidates through arguments of shared identity, facilitating voter mobilization on behalf of the same identity.

Keywords: *Identity Politics, History, and Contestation*

A. Latar Belakang Masalah

Studi politik identitas erat kaitannya dengan dinamika sosial dalam masyarakat. Kesamaan antara kelompok sebagai faktor pemersat¹ dan perbedaan sebagai kategori politik² menjadi fokus penelitian politik identitas, yang memandang batas-batas politik masyarakat sebagai pendorong utama. Kesadaran identitas kolektif dan artikulasi kepentingan lokal terkait erat dengan etnisitas, agama, dan

¹ Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Ithaca: Cornell University Press, 1983)

² Agnes Heller dan Punsher, Sonja. *Biopolitical Ideologies and their Impact on the New Social Movements: A New Handbook of Political Societies* (Oxford, Blackwell, 1995), hal: ix.

ideologi³ menjadi dorongan utama dalam menciptakan politik identitas. Dalam setting politik, faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan tidak terpisah-pisah, membentuk modal pemenangan kandidat calon pemimpin, seperti yang terlihat dalam konteks Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta,⁴ serta pada periode sejarah politik Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Orde Lama.

Pada era Soekarno, politik identitas memainkan peran dominan di antara partai politik, terutama dalam pertarungan ideologi melalui bahasa lisan dan tulisan. Anderson⁵ dan Geertz⁶ menemukan kontestasi antara kelompok nasionalis dan Islam serta antara kelompok sosial keagamaan seperti santri, priyayi, dan abangan. Identitas bermacam-macam bentuknya, tercermin melalui platform dan ideologi partai politik seperti Masyumi yang mengidentikkan diri dengan *vis-a-vis* ateisme,⁷ PNI dengan jargon nasionalisme dan anti kolonialisme,⁸ dan PKI dengan pembelaan pada rakyat kecil⁹. Perbedaan identitas menciptakan stigmatisasi dan konflik antar-kelompok, bahkan berujung pada perlawanan¹⁰, seperti gerakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat atas perjanjian Renville. Kekecewaan juga terlihat dalam keluarnya Partai Masyumi dari kabinet, menegaskan Islam sebagai pemersatu masyarakat dan alasan pembatasan aktivisme Islam di politik berikutnya.

Masa Orde Baru menunjukkan perubahan dalam politik identitas Islam yang redup dan absen dari arena politik partai Islam. Pemerintah menerapkan kebijakan demobilisasi politik Islam melalui fusi partai dan menegakkan Pancasila sebagai azas tunggal, mengendalikan aktivisme Islam, dan membatasi akses politik dan ekonomi kelompok Islam¹¹. Kelompok abangan dan Tionghoa, sebaliknya, mendapat keuntungan dari kebijakan tersebut. Setelah kejatuhan Soeharto, kelompok Islam mengalami revitalisasi politik dengan partisipasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat daerah dan nasional.^{12 13} Partai politik seperti PKS, PAN, PKB, dan PBB mewakili kelembagaan politik Islam,¹⁴ sementara kelompok masyarakat seperti FPI, Laskar Jihad, Ahlussunnah Wal Jamaah, HTI, Harakah Tarbiyah, dan MMI terlibat dalam mobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu dalam berbagai kontestasi politik. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik Islam

³ Ahmad Syafii Maarif. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta, Democracy Project, 2012)

⁴ Mengenai tindak persekusi yang dilakukan kelompok tertentu yang mengatasnamakan dalil keagamaan lihat Nafik Muthohirin. "Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural" *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 6 No. 1 Juli-Desember 2019, hal: 47-56.

⁵ Benedict R.O.G Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (London : Cornel University Press, 1990)

⁶ Clifford Gertz, *Santri Priyayi dan Abangan*, (Jakarta:Dunia Pustaka Jaya, 1983)

⁷ Boyd R Compton, Muslim Radicalism; The Anti Communist Front", *Institute of Current World Affair*, Maret 5, 1955.

⁸ Robert W Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2010), hal. 39

⁹ Abdil M. Mudhoffir, *Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, *Prisma* 36 No 3 (2017), 50

¹⁰ Clifford Gertz, *Santri Priyayi dan Abangan*, (Jakarta:Dunia Pustaka Jaya, 1983)

¹¹ William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992).

¹² Mark R Woodward, *Indonesia, Islam, and the prospect for democracy*, *SAIS Review*, 2001, 21/2, pp. 29–37

¹³ Martin van Bruinessen, *Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia*, *South East Asia Research*, (2002), 10/2, pp. 117–54

¹⁴ Amin Muzzakir, *Islam Politik di era Kontemporer*, *Jurnal Epistemé*, Vol. 11, No. 1, Juni (2016), hal. 43

dari depolitisasi pada masa Orde Baru menuju revitalisasi dan partisipasi aktif pasca kejatuhan rezim tersebut.¹⁵

Penguatan politik identitas Islam menciptakan ekspresi keberagaman yang nyata di ruang publik, seperti program televisi Islami, bank syari'ah, hotel syari'ah, sekolah Islami, rumah sakit Islami, dan sertifikasi halal di gerai-gerai fast food asing.¹⁶ Fenomena ini tidak hanya mencerminkan komodifikasi agama atau peningkatan kesadaran religius, tetapi juga menunjukkan penerimaan publik terhadap politik identitas Islam¹⁷, khususnya dalam wacana Islamisme. Ekspresi keberagaman di ruang publik bukan sekadar fenomena kultural, melainkan hasil dari suksesnya artikulasi politik identitas Islam yang diframing dalam ruang publik sebagai strategi untuk memperoleh dukungan politik.¹⁸ Pada tingkat daerah, politik identitas Islam tidak hanya beradaptasi dengan kondisi sosial dan sejarah Islam setempat, tetapi juga bersifat adaptif terhadap kelompok Islam transnasional.¹⁹ Ini mencakup hubungan mutualistik dengan struktur dan aktor keagamaan mapan seperti NU dan Muhammadiyah, serta keterlibatan dengan kelompok Islam transnasional yang mendorong agenda penerapan syaria. Sejarah berdirinya partai politik Islam, seperti PAN yang diasosiasikan dengan Muhammadiyah dan PKB yang terkait dengan NU, menunjukkan peran penting lembaga keagamaan dalam politik identitas Islam, terutama setelah era reformasi dan pembukaan ruang demokrasi oleh organisasi seperti Muhammadiyah dan NU.

Kehadiran kelompok-kelompok Islam baru ini turut merubah politik identitas Islam. Pandangan keberislaman yang berbeda berimbas pada perubahan perilaku dan pandangan keIslaman sebagian umat Muslim. Dari sikap dan pandangan yang berkarakter moderat dan inklusif menjadi konservatif dan eksklusif. Bahkan sering didapati sikap dan pandangan ini dibarengi dengan tindak kekerasan dengan alasan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*).²⁰ Lebih lanjut pergeseran paradigma keagamaan ini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sosial keagamaan, tetapi juga dalam perilaku pemilih dan pilihan politik. Perilaku pemilih yang berubah tentu dibarengi dengan perubahan politik identitas Islam terutama pengakomodiran isu penerapan *syaria*. Sifat akomodatif dan adaptif atas isu yang berkembang pada pemilih muslim menjadi karakter partai politik Islam yang secara

¹⁵ Mengenai kemunculan gerakan-gerakan Islam Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia dan Salafisme Islam bisa baca dalam Nafik Muthohirin, *Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus* (Jakarta: IndoStrategi, 2014). Lihat juga dalam Nafik Muthohirin. "Reproduksi Salafisme: Dari Kesunyian Apolitis menjadi Jihadis".

Jurnal Sosial-Budaya UIN Sultan Syarif Kasim Riau Vol. 14. No.1 (2017), hal: 55-62

¹⁶ Greg Fealy, "Mengonsumsi Islam: Agama yang Dijadikan Jualan dan Kesalehan yang Diidam-idamkan", dalam Greg Fealy & Sally White. *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm: 15-16.

¹⁷ Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar, *Islam di ruang Publik Politik identitas dan Masa Depan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal: 2

¹⁸ Ali Asghar, *Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam Indonesia*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. I, No. 2 (2015), hal.2000

¹⁹ Kathryn Robinson, *Sawerigading vs. Sharia: Identities and Political Contestation in Decentralised Indonesia*, Asian Journal of Social Science, 39 (2011), hal. 219-237

²⁰ Sholihul Huda. *The Clash of Ideology Muhammadiyah: Pertarungan Ideologi Moderat versus Radikal* (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2017), hal: 92.

eksplicit tidak mencantumkan ideologi Islam namun berusaha untuk *concern* dengan isu politik yang berkembang di basis pemilihnya²¹.

Terjadinya pergeseran pandangan keIslaman yang turut merubah perilaku pemilih dalam menentukan sikap politik mereka akan menjadi rumusan masalah studi ini dengan menjadikan kecataman Paciran Lamongan sebagai lokasi penelitian. Seting awal kelembagaan Islam di Lamongan dengan menggunakan hasil riset Dawam Rahardjo menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki tradisi politik dan paradigma keagamaan yang moderat.²² Fakta awal itu berubah seiring dengan alumni pesantren di daerah tersebut menuntut ilmu ke Timur Tengah dan pulang dengan mendesiminasikan pemikiran Islam transnasional serta menjadi aktor-aktor bagi berdirinya sejumlah organisasi Islam baru seperti FPI, MMI, HTI, Harakah Tarbiyah dan Jamaah Salafi.²³

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Masyarakat Muslim di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena adanya keragaman organisasi keagamaan yang cenderung dinamis dan setiap aliran keagamaan mempunyai pilihan politik yang juga beragam. Selain itu, ada dua pesantren yang mewakili corak keIslaman yang modern yaitu Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran dan bercorak Islam tradisional yaitu Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran. Masing-masing mempunyai pengaruh kultural yang kuat bagi masyarakat sekitaran pantai utara Lamongan.

Subyek penelitian yang akan dijadikan sumber penelitian adalah: *Pertama*, data sekunder yang bersumber dari artikel yang berkaitan dengan politik identitas keagamaan selama berlangsungnya Pemilu 2019; *Kedua*, wawancara mendalam kepada elit-elit lokal yang meliputi tokoh partai politik, tokoh ormas. (Muhammadiyah, NU, Kyai atau pengasuh pesantren setempat, serta agen-agen kunci yang berperan penting dalam memobilisasi mengemukakan politik identitas agama di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan; *Keempat*, sumber pustaka yang berkaitan dengan topik riset ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Studi perilaku pemilih pada pemilu 2019 menyoroti politik identitas agama. Terdapat tiga pendekatan dalam menganalisis perilaku pemilih: Pendekatan

²¹ Anies Rasyid Baswedan, Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory, Asian Survey, Vol. 44, No. 5 (September/October 2004), pp. 669-690

²² M. Dawam Raharjo. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1987).

²³ Secara umum, sesungguhnya infiltrasi pandangan keagamaan ormas-ormasi Islam ini tengah meluas tidak hanya menyasar publik di dunia nyata, tapi juga secara sistematis melakukan propaganda dan diseminasi pemikiran melalui media sosial. Baca selengkapnya dalam Nafik Muthohirin. "Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial". *AFKARUNA: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*. Vol. 11. No.2 (2015), hal: 240-259.

Sosiologis Berelson, Lazarsfeld, dan McPhee²⁴ menekankan pengaruh nilai-nilai sosiologis seperti agama, kelas sosial, etnis, dan pendidikan dalam memengaruhi pilihan politik.²⁵ Teori lingkaran sosial mengandaikan bahwa pemilih terikat dalam berbagai lingkaran sosial seperti keluarga dan pertemanan, yang membentuk konteks untuk pengambilan keputusan politik mereka. Penelitian Berelson, Saiful Mujani, dan lainnya menunjukkan bahwa faktor sosiologis dan demografis, termasuk sentimen agama, berpengaruh besar terhadap partisipasi politik pemilih, dengan adanya perubahan sikap dan dukungan pada setiap kontestasi Pilpres dan Pileg.

Teori lingkaran sosial, yang meyakini bahwa setiap individu terikat dalam berbagai lingkaran sosial seperti keluarga, tempat kerja, dan pertemanan, memberikan pemahaman terhadap perilaku memilih dengan asumsi bahwa pemilih hidup dalam konteks tertentu yang mencakup status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia. Lingkaran sosial ini dianggap memengaruhi keputusan pemilih karena adanya kontrol dan tekanan sosial. Penelitian Berelson, Saiful Mujani, R William Liddle, dan Kuskridho Ambardi mengkonfirmasi bahwa faktor sosiologis dan demografis memiliki dampak signifikan pada partisipasi politik pemilih. Sentimen agama juga berperan dalam membentuk solidaritas sosial melalui pembentukan komunitas keagamaan. Meskipun sentimen etnis dan suku cenderung tetap, kontrasnya terlihat pada sikap dan dukungan parpol atau kandidat yang dapat berubah di setiap kontestasi Pilpres dan Pileg.²⁶

Dalam penelitian *Political Participation and Voting Behavior in General Election 2014* oleh RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, ditemukan bahwa perilaku pemilih terkait faktor sosiologis memiliki aspek penting. *Pertama*, ketaatan beribadah tidak selalu memengaruhi pilihan partai politik, tetapi pemilih lebih cenderung memilih calon legislatif dengan latar belakang agama yang sama. *Kedua*, janji bantuan materi kurang berpengaruh pada pemilih secara umum, namun bagi yang berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan rendah, janji tersebut menjadi pertimbangan. *Ketiga*, pemilih pemula cenderung dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga dan komunitas.²⁷ Dalam konteks politik identitas agama, Arif Nurul Iman menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas agama dapat efektif untuk memenangkan dukungan signifikan, seperti terlihat

²⁴ Berelson, B.R., Lazarsfeld, P.F. and McPhee, W.N. *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign* (Chicago: The University of Chicago Press, 1954).

²⁵ Bartels, L. M. "The Study of Electoral Behavior" dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press. (2012) Hal. 240.

²⁶ Hal ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi dalam perolehan suara Pileg secara langsung yang mengalami penurunan signifikan, dari 93% suara pada 1999 dengan kemenangan atas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebanyak 34% suara menjadi 84% suara pada 2004 dengan kemenangan atas Partai Golongan Karya (Golkar), lalu 71% suara pada 2009, dan 75% suara pada 2014 dengan kemenangan PDIP sebanyak 19% suara. Dari hasil empat kali pemilu tersebut bisa dilihat terdapat perubahan hasil pemilihan yang cukup signifikan, tetapi dilihat dari perilaku pemilih dari sisi sosiologis maupun antropologis tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Lihat selengkapnya dalam Saiful Mujani, R Wiliam Liddle dan Kuskridho Ambardi. *Kaum Demokrat Kritis*....hal: 67

²⁷ RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, *Political Participation and Voting Behavior in General Election 2014* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2015).

dalam kemenangan Prabowo-Sandi di Jawa Barat pada Pilpres 2019, karena karakteristik masyarakat yang kuat secara sosiologis terhadap identitas agama.²⁸

Fajar Sodik Ramlah dalam penelitian "*Religious Issues Marketing In Indonesia Local Election 2015-2018*" menyoroti peran strategis isu agama dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya selama 2015-2018. Isu agama digunakan sebagai instrumen strategis dalam kontes pilkada, baik melalui ajakan memilih pemimpin seagama maupun larangan memilih pemimpin berbeda agama.²⁹ Produksi isu agama terkait dengan konteks sosial politik lokal dan kompetisi antarkandidat. Konteks lokal mencakup sentimen dan pengalaman konflik agama masa lalu, diintegrasikan dalam *black campaign* untuk mendiskreditkan lawan politik. Konteks kompetitor memunculkan isu agama jika salah satu kandidat berlatar belakang minoritas, dengan identitas minoritas menjadi sumber utama produksi isu agama. Selain itu, penelitian oleh Rahmaturrizqi, Choirun, & Fathul menunjukkan bahwa identitas gender juga berpengaruh signifikan, di mana pemilih perempuan cenderung memilih pria sebagai pemimpin karena keyakinan bahwa pria lebih berhak dan pantas memimpin.³⁰

Menurut Roth, model sosiologis memberikan penjelasan yang baik terhadap perilaku pemilih yang stabil, namun kurang mampu menjelaskan perubahan pilihan politik individu. Model ini lebih fokus pada kondisi sosial daripada individu sebagai pusat analisis.³¹ Sebagai alternatif, pendekatan psikologis, seperti The Michigan Model, muncul sebagai kritik terhadap keterbatasan metodologis pendekatan sosiologis. Dalam model ini, orientasi politik terbentuk melalui keterikatan psikologis, dipengaruhi oleh persepsi terhadap partai atau kandidat, serta isu-isu yang diangkat.³² Pendekatan ini menekankan peran individu sebagai pusat analisis, dengan party ID (identifikasi partai) sebagai faktor kunci. Menurut Dalton, pendekatan psikologis berusaha menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilu melalui identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema.³³ Dalam penelitian Haryanto, identifikasi partai memengaruhi perilaku memilih, dengan loyalitas partisan yang membangun orientasi pemilih terhadap politik, mencakup aspek jangka panjang dan pendek seperti popularitas kandidat.³⁴ Singkatnya, Party ID menjadi faktor utama perilaku memilih di politik lokal Indonesia. Kini, kedekatan etnis atau daerah tidak lagi dominan, karena pemilih lebih cenderung mengidentifikasi diri dengan partai dan memilih kandidat yang diusung partai mereka.

²⁸ Arif Nurul Iman, "*Jokowi-Ma'ruf Amin Vs Prabowo-Sandi, Berebut Suara Penentu di Jawa Barat*", (Jakarta: KOMPAS, 13 April 2019).

²⁹ Fajar Sodik Ramlah, *Religious Issues Marketing In Indonesia Local Election 2015-2018*, Jakarta : LIPI Jurnal Penelitian Politik, Volume 15 No. 2 Desember 2018 | 249–265

³⁰ Rahmaturrizqi, Choirun, & Fathul, *Gender dan Perilaku Pemilih; Sebuah Kajian Psikologi Politik*, Jurnal Psikologi dan Teori Terapan, Vol 3.(Tahun 2012), No. 12.

³¹ Dieter Roth. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode* (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009), hal: 37

³² Roth..Hal. 38

³³ R.J Dalton, *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. (New York: Chatham House Publishers, Tahun 2002), hal. 132

³⁴ Haryanto "*Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17, Nomor 3, (Maret 2014), (291-308) ISSN 1410-4946.

Teoretikus identitas seperti Campbell, Converse, Miller, dan Stokes berpendapat bahwa sikap dan perilaku politik, meskipun terkait erat, sebenarnya merupakan dua entitas yang berbeda. Identitas kepartaian terletak pada tingkat orientasi sikap, bukan pada tindakan atau perilaku konkret.³⁵ Sebagai contoh, warga Amerika yang mengidentifikasi diri dengan partai Demokrat tidak selalu mendukung kebijakan pemerintah Demokrat. Pada pemilihan presiden 2009 di Indonesia, mereka yang mengidentifikasi diri dengan partai PDI tidak otomatis memilih Megawati. Gerber, Huber, dan Washington berpendapat bahwa identitas kepartaian tidak selalu terkait erat dengan sikap dan perilaku politik, seperti partisipasi dan pilihan politik.³⁶ Menurut Weisberg, dalam pemilihan presiden Amerika, orang cenderung memilih kandidat karena merasa dekat dengan partai kandidat, bukan sebaliknya³⁷.

Dalam penelitian Norris mengenai hubungan antara berita negatif dan pertumbuhan warga yang kritis, disimpulkan bahwa pelaporan berita televisi standar dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketidakpuasan terhadap lembaga politik, berkontribusi pada keterasingan warga sipil. Selain itu, fungsi pengawasan jurnalis (watchdog journalism) dapat memunculkan efek samping berupa "gelombang pasang ketidakpercayaan politik."³⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa peran media dan ketersediaan informasi politik sangat penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Pendekatan pilihan rasional, yang bersumber dari karya Anthony Downs, James Buchanan, Gordon Tullock, dan Olsen, menekankan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di tingkat individu (egosentrik) maupun di tingkat lokal, regional, dan nasional (sosiotropik).³⁹ Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis sebelumnya, yang dianggap menempatkan pemilih dalam kerangka yang terlalu deterministik. Pendekatan sosiologis menekankan bahwa perilaku memilih ditentukan oleh struktur sosial seperti usia, pendidikan, pendapatan, dan agama.

Dalam penelitian Burhanuddin Muhtadi mengenai populisme politik identitas dan dinamika elektoral, ditemukan bahwa perilaku memilih sangat dipengaruhi oleh politik uang,⁴⁰ dimana praktik jual beli suara menjadi umum terutama pada Pemilu 2014. Sekitar 33% dari total pemilih, atau sekitar 60 juta orang, terpapar oleh praktik tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang dilakukan oleh semua calon kandidat dari berbagai partai politik, mempengaruhi perilaku pemilih di tingkat akar rumput secara sistematis dan masif. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan faktor pemilih yang mendasarkan pilihan pada etika, moral, toleransi, dan identitas agama serta etnis.

³⁵ Miller Warren E. dan J.Merril Shaks. *The New Ammerican Voter* Cambridge, MA: (Harvard University Press. tahun: 1996), Hal; 120

³⁶ Alas Gerber, Gregory A. Huber, dan ebonya Washington. *Partisanship, adn Political Beliefs: A Filed Exsperimnt*. (American Political Science Review, Th. 2010), Hal. 104.

³⁷ Weisberg, Herbert F, "Political Partisanship". *Measures of Political Attitudes*. San Diego: Academic Press).

³⁸ Pippa Norris, *Democratic Deficit*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hal.169.

³⁹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 92.

⁴⁰ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral Menggurai jalan panjang demokrasi prosedural* (Malang: Intrans Publising 2019), hal: 277.

Fiorina⁴¹ memiliki pandangan berbeda dengan Burhanudin, menganggap kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebagai dasar “*reward and punishment*”, dengan fokus pada evaluasi kondisi ekonomi politik dan pelaksanaan pemerintahan. Menurut Fiorina, ekonomi politik adalah faktor kunci yang dipertimbangkan oleh pemilih dalam menilai kinerja pemerintah. Penilaian positif terhadap ekonomi nasional signifikan dalam memengaruhi pandangan terhadap partai atau presiden yang berkuasa, sementara penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah berpengaruh pada partai politik dan kandidatnya. Meskipun kecenderungan pemilih Indonesia semakin rasional, Wein Arifi⁴² menunjukkan melalui penelitiannya bahwa tidak ada pendekatan tunggal, dengan enam variabel yang digunakan, termasuk sosiodemografi, informasi politik, orientasi tokoh politik, identifikasi kepartaian, ekonomi politik, dan politik uang.

Berbeda dengan Burhanudin, Fiorina melihat bahwa kepuasan atas kinerja pemerintahan menjadi dasar “*reward and punishment*”, diantara variabel rasional yang diukur dalam study indikator ini adalah evaluasi terhadap kondisi ekonomi politik dan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu menurut Fiorina ekonomi politik adalah faktor kunci. Dalam definisinya ekonomi politik merupakan kinerja pemerintah yang dilihat oleh para pemilih dalam kehidupan rumah tangga dan perekonomian nasional.

Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan dalam literatur penelitian politik dengan fokus pada identitas keagamaan, khususnya dalam konteks pemilihan umum 2019. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan makro dan survei dengan kerangka sosiologis, psikologis, dan rasionalis, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menganalisis perilaku pemilih Muslim di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Fokus utama adalah pada politik identitas Islam dan aspek-aspek sosiologis, struktural, dan agensial yang mempengaruhi perilaku pemilih selama pemilu 2019. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antara identitas keagamaan dan dinamika politik di tingkat lokal.

Identitas dan politik identitas

Identitas dan politik identitas adalah istilah yang relatif baru, yang pertama dipopulerkan psikolog Erik Erikson pada dekade 1950-an, dan yang kedua muncul secara sekilas dalam politik budaya pada dekade 1980-an serta 1990-an. Saat ini, identitas memiliki banyak arti, dalam beberapa kasus hanya merujuk pada kategori atau peran sosial, dan dalam hal lain sebagai informasi dasar tentang seseorang. Dalam konteks ini identitas selalu ada.⁴³ Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik.

⁴¹ Fiorina, *Retrospective Voting in American National Elections* (Yale : Yale University Press. Th. 1981).

⁴² Wein Arifin. *Perilaku Memilih dalam Pemilu: Analisis Faktor Pembentuk Perilaku Pemilih di Kota Jambi* (Yogyakarta: Orbit, 2016), hal: 18.

⁴³ James D. Fearon. *What Is Identity (As We Now Use the Word?)*, naskah di publikasikan 3 (November 1999). Dikutip dari <http://fearnresearch.stanford.edu/53-2>.

Identitas atau jati diri, menurut Suparlan, mencakup pengakuan terhadap individu atau kelompok yang terkait dengan karakteristik tertentu,⁴⁴ membentuk satu kesatuan yang membedakannya dari golongan lain. Konsep identitas secara umum merujuk pada citra yang memisahkan individu atau kelompok dari yang lain dalam interaksi sosial, menghasilkan opini terkait keberadaan mereka.⁴⁵ Giddens melihat identitas diri sebagai keahlian dalam menceritakan tentang diri, menjawab pertanyaan kritis mengenai tindakan, cara melakukannya, dan siapa sebenarnya individu atau kelompok tersebut. Identitas diri bukanlah kumpulan sifat, melainkan konstruksi naratif yang membentuk lintasan perkembangan dari masa lalu hingga masa depan.⁴⁶ Stuart Hall, dalam konteks identitas budaya, membedakan tiga pendekatan: subjek pencerahan, subjek sosiologi, dan subjek posmodernisme. Pada era pencerahan, subjek dianggap sebagai agen kesatuan yang unik, dengan identitas yang tetap kontinu sepanjang hidupnya.⁴⁷

Terdapat tiga pendekatan utama dalam pembentukan identitas, yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Primordialisme menganggap identitas diperoleh secara alamiah dan turun temurun, konstruktivisme melihat identitas sebagai hasil dari proses sosial kompleks, dan instrumentalisme menekankan identitas sebagai konstruksi untuk kepentingan elit dengan fokus pada aspek kekuasaan. Agnes Heller mengartikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang menekankan perbedaan sebagai kategori politik utama,⁴⁸ mengakui keragaman individu di dalam setiap komunitas. Politik identitas, menurut Lukmantoro, adalah upaya untuk memajukan kepentingan anggota kelompok dengan kesamaan identitas, seperti ras, etnis, jender, dan agama.⁴⁹ Dalam praktiknya, politik identitas mencakup penyaluran aspirasi, pengaruh terhadap kebijakan, penguasaan nilai-nilai berharga, dan bahkan tuntutan penentuan nasib sendiri berdasarkan primordialisme, tercermin dalam konteks etnisitas dan keagamaan, termasuk upaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah atau menggulirkan gerakan separatisme.

Politik identitas, dalam pengertian yang lebih luas, memiliki tujuan untuk membebaskan kelompok dari keterpinggiran, khususnya dalam konteks konstituensi kelompok. Secara esensial, politik identitas dapat dianggap sebagai bentuk biopolitik yang mengidentifikasi kelompok berdasarkan karakteristik biologis atau tujuan biologis mereka, seperti politik ras dan politik gender.⁵⁰ Meskipun politik identitas sering digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan, pendekatan ini menuai kritik tajam karena dapat memperkuat perbedaan dan mengakibatkan konflik. Politik identitas cenderung mempertegas keutuhan kelompok berdasarkan

⁴⁴ Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa* (Jakarta: KIK Press, 2004), hal: 25

⁴⁵ Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas* (Jakarta: YOI, 2014), hal:27

⁴⁶ Anthony Giddens, *Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age* (Stanford: California University Press, 1991), hal: 75.

⁴⁷ Stuart Hall. "Who Need Identity", in Hall and Du Gay, P (eds), *The Question of Cultural Identity* (London: Sage Publication, 1992), hal: 275.

⁴⁸ Ubed Abdillah. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas* (Magelang, Indonesiatera, 2002), hal: 16.

⁴⁹ Triyono Lukmantoro, *Kematian Politik Ruang* (Jakarta: Kompas, 2008).

⁵⁰ Agnes Heller, dan Punsher, Sonja, *Biopolitical Ideologies an Their Impact on the New Social Movements. A New Handbook of Political Societies* (Oxford: Blackwell, 1995), hal: 4.

identifikasi primordialitas, yang bersifat esensialistik tentang keberadaan sosial tertentu.

Sejarah Asal Usul Praktik Politik Identitas dan Pertarungan Antar Identitas di Desa Paciran Lamongan

Pada bab ini menjelaskan sejarah asal-usul Praktik Politik Identitas yang terjadi di desa Paciran Lamongan, praktik politik identitas di desa Paciran tidak tiba-tiba hadir begitu saja dalam realitas ruang dialektika politik di Paciran akan tetapi terdapat runtutan peristiwa masa lalu yang mengkonstruksi praktik-praktik politik yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Tidak hanya aspek politik lokal akan tetapi perubahan peta politik nasional juga berperan besar pada perubahan dan dialektika politik lokal di Paciran, beberapa peristiwa sejarah besar juga berdampak pada perubahan praktik-praktik politik di tingkat lokal. Oleh karena itu peristiwa demi peristiwa politik dalam sejarah punya peran yang cukup signifikan dalam mengkonstruksi praktik-praktik politik identitas di Paciran Lamongan.

Pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, umat Islam merasa perlu mengorganisir kekuatan politiknya,⁵¹ dan pada 7-8 November 1943 diadakan Mukhtar Islam Indonesia di Yogyakarta, yang menghasilkan pembentukan partai politik Masyumi sebagai wadah politik Islam.⁵² Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat untuk membentuk partai politik terkait dengan pemilihan umum yang akan datang.⁵³ Dalam upaya memperkuat posisi partai Islam, kongres NU di Purwokerto tahun 1946 menyerukan agar NU menjadi tulang punggung Masyumi.⁵⁴ Namun, upaya menyatukan kekuatan umat Islam dalam satu partai⁵⁵ menghadapi hambatan karena Masyumi diisi oleh beragam corak latar belakang, ideologi, nilai, tujuan, dan visi-misi. Faksi-faksi dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, PUSA, dan Sarekat Islam dalam Masyumi mulai saling bersaing dan memperebutkan pengaruh. Akibatnya, beberapa kelompok, seperti Sarikat Islam, memisahkan diri dari Masyumi dan mendirikan Partai Serikat Islam Indonesia pada tahun 1947.

Ketidakmampuan pemimpin Masyumi dalam melakukan negosiasi dan kompromi mempercepat perpecahan di dalam partai,⁵⁶ dan pada tahun 1952 Nahdatul Ulama (NU) keluar dari Masyumi,⁵⁷ bermetamorfosis menjadi Partai Nahdatul Ulama (PNU). Pada pemilu 1955, NU berhasil meraih suara signifikan, memenangkan 45 kursi di Parlemen dan menduduki beberapa posisi kunci dalam

⁵¹ Deliar Noer. 1987. Partai Islam Di Pentas Nasional. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hal 45-47.

⁵² Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 55.

⁵³ Maklumat tersebut menyatakan bahwa dengan adanya partai politik, berbagai aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Maklumat ini juga terkait dengan rencana pemilihan umum pada 1946. Lihat Deliar Noer & Akbarsyah, *Op. Cit.*, hal. 37

⁵⁴ Martin Van Bruinessen. NU Tradisi relasirelasi kuasa dan Pencarian makna Baru. Jogjakarta: Lkis. 2009. Halaman 55

⁵⁵ M.Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam politik (Jakarta: Gramedia Pusat Utama: 1994), hlm. 172.

⁵⁶ Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914- 2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan. Jogjakarta: ArRuzz. 2010. Halaman 11

⁵⁷ M Ali Haidar, *Op.cit*, hlm. 105.

Kabinet, seperti Wakil Perdana Menteri dan Menteri Agama. Keberhasilan PNU mengubah peta politik Indonesia, di mana partai-partai Islam mendominasi Parlemen dengan total 114 kursi dari 257 kursi yang diperebutkan. Masyumi memperoleh 57 kursi, PSII 8 kursi, dan PERTI 4 kursi. Dinamika politik elit ini berdampak signifikan pada tingkat lokal, termasuk di Desa Paciran, Lamongan, di mana keluarnya NU dari Masyumi menyebabkan migrasi pemilih dan pengurus di tingkat bawah.

Lamongan adalah medan pertarungan sengit Partai Islam dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setidaknya ini bisa kita lihat dari hasil pemilu di Lamongan tahun 1955. Di pesta demokrasi yang diikuti oleh 48 partai politik ini, tiga besarnya adalah Masyumi, PKI, dan NU. Masyumi memperoleh 117 ribu suara, PKI 87 Ribu, PNU 70 ribu PNI yang menjual nama Bung Karno saja hanya mendapat 50 ribu suara. Bahkan di Pemilu Daerah tahun 1957, ketika suara Masyumi turun, suara PKI justru naik.



Dengan adanya dua partai besar umat Islam, Masyumi dan Partai Nahdatul Ulama (PNU), masyarakat Kabupaten Lamongan, termasuk di Desa Paciran, terbelah dalam dua pilihan politik mayoritas warga Muslim. Pembelahan ini menciptakan konflik di antara pemilih Muslim di Desa Paciran, di mana Partai NU didukung oleh warga Nahdiyin dan Partai Masyumi mendapat dukungan penuh dari warga Muhammadiyah. Faktor kesejarahan dan historisitas memainkan peran signifikan dalam proses perkembangan politik di pantura Lamongan, khususnya di Desa Paciran. Sejarah mempengaruhi pembentukan kemandirian dalam pilihan politik warga, dari kontestasi politik nasional hingga pemilihan kepala desa. Dengan demikian, faktor sejarah dan identitas memiliki dampak yang sangat berarti dalam membentuk preferensi politik di desa tersebut. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Zainal Abidin Ketua GP Ansor Paciran:

Dari dulu mas, warga Muhammadiyah disini sangat fanatic kami disini hampir selalu berbeda dalam soal pilihan mulai dari pilihan presiden, gubernur, bupati bahkan pilihan kepala desa kami seringkali berbeda pilihan. (wawancara: Zainal Abidin Ketua GP Ansor Paciran).

Sejarah Panjang pertarungan antar identitas diatas memberikan kontribusi besar terhadap praktik-praktik politik atas nama identitas yang terus menerus di produksi dan direproduksi oleh para aktor dan struktur sehingga sangat mempengaruhi kemandirian politik Masyarakat paciran. Produksi dan reproduksi praktik politik identitas yang terus berulang dalam kurun waktu yang panjang dapat mengkontruk pola pikir Masyarakat paciran yang akan selalu *sami'na wa atho'na* dengan pilihan politik agent dan struktur.

Gambaran Peta Politik Muhammadiyah Paciran

Sejak berdirinya Masyumi, hubungan antara Muhammadiyah dan partai Islam tersebut terjalin dengan baik, sebagai bukti keanggotaan Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi. Kesamaan tujuan dan cita-cita keduanya, yaitu menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam, serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan, menjadi argumen kuat untuk kedekatan Muhammadiyah dengan Masyumi.⁵⁸ Pasang surut relasi ini tercermin dalam tiga periode. Pertama, pada paruh kedua dasawarsa 1950-an (1950-1955), relasi baik ditandai dengan banyaknya pengurus Muhammadiyah di dalam Masyumi, mencapai lebih dari 53%, termasuk dalam struktur pengurus harian dan kabinet beberapa periode, mencapai puncaknya pada kabinet Wilopo dengan empat jabatan. Namun, pada kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Muhammadiyah tidak terlibat karena Masyumi memutuskan menjadi oposisi.⁵⁹

Dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1956, empat pandangan berbeda muncul mengenai relasi Muhammadiyah dan Masyumi. Pertama, terdapat pandangan yang mengusulkan pemisahan Muhammadiyah dari Masyumi untuk membentuk partai politik sendiri, dengan argumen bahwa Muhammadiyah, sebagai gerakan sosial keagamaan, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Kedua, pandangan yang ingin memisahkan hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi, kembali ke tradisi dakwah *Amal Ma'ruf Nahi Munkar*, dan fokus sebagai organisasi sosial keagamaan murni tanpa terlibat dalam politik praktis. Pandangan ketiga mengusulkan pemisahan dan pembentukan Muhammadiyah sebagai partai politik, tetapi tetap menjaga relasi dengan organisasi Islam lain melalui federasi. Terakhir, ada pandangan yang mendukung hubungan Muhammadiyah dan Masyumi tetap berlangsung, dengan argumentasi bahwa Muhammadiyah dapat lebih efektif dalam mewujudkan cita-citanya dengan mempertahankan hubungan baik dengan partai politik Islam, terutama Masyumi, karena peran politik dianggap memperbesar dampak dakwah Muhammadiyah.

Fakta sejarah di atas menggambarkan peran kader-kader Muhammadiyah dalam perjuangan politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita organisasi tersebut. Muhammadiyah mengarahkan perjuangan politiknya melalui partai politik Islam dan tetap teguh dalam keputusannya untuk tidak menjadi partai politik sendiri. Mereka meyakini bahwa perjuangan politik harus dilakukan bersama dan bersatu dengan kekuatan Islam lainnya, dan isolasi dalam perjuangan politik tidak akan

⁵⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafitri Press, 1987), hlm. 118.

⁵⁹ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi* (Jakarta: Grafitri, 1997), Hal. 151.

berhasil. Namun, pada akhirnya, hubungan Muhammadiyah dan Masyumi berakhir setelah sidang tanwir Mei 1959. Keputusan resmi Muhammadiyah untuk menghapus status anggota istimewa Masyumi menandai akhir dari romantisme politik di antara keduanya.⁶⁰ Meskipun tidak mudah untuk melepaskan keanggotaan istimewa, Muhammadiyah mempertegas posisinya dengan meninggalkan Masyumi. Hal ini menunjukkan sikap politik Muhammadiyah yang lebih memilih kembali ke jalur dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* daripada terlibat dalam politik praktis.

Pada tahun 1950-an, Masyumi memasuki desa Blimbing di Lamongan di bawah bimbingan Kyai Sya'dullah, seorang tokoh Islam yang telah menempuh pendidikan Islam di Arab Saudi. Di Blimbing, Kyai Sya'dullah mengembangkan ilmunya melalui organisasi Masyumi dan mendatangkan muballigh Masyumi, Abdul Kahar Mudzakir,⁶¹ dari pusat. Kecamatan Paciran, khususnya Desa Blimbing, menjadi basis utama Masyumi,⁶² menciptakan hasil signifikan pada tahun 1958 dengan terpilihnya K.H. Abdurrahman Syamsuri sebagai anggota DPRD Fraksi Masyumi. Di Lamongan, anggota DPRS seperti Musfiroh mewakili 'Aisyiyah dan Mukhid mewakili Muhammadiyah. Setelah pembubaran Masyumi pada tahun 1960, banyak tokoh yang sebelumnya aktif di Masyumi kembali ke Muhammadiyah di Lamongan, termasuk R.H. Moeljadi, H. Ali, dan H. Syamsul. Masuknya tokoh-tokoh Masyumi tersebut memberikan dampak positif yang besar pada perkembangan Muhammadiyah di wilayah tersebut.

Argumentasi diatas mempertegas peran penting masyumi dalam berkontribusi terhadap ekspansi dakwah *amar ma'ruf nahie mungkar Muhammadiyah* di paciran Lamongan. Lembaran peta politik baru dimulai pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mulai merampingkan jumlah partai-partai peserta pemilu. Dari sepuluh partai yang ada disederhanakan menjadi dua partai politik. Partai yang berazas nasionalis dan Kristen seperti PNI, IPKI, Partai Murba, Parkindo, dan Partai Katolik dilebur kedalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan partai-partai yang berazas Islam seperti Partai NU, Parmusi, Perti dan PSII dilebur ke dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Golongan karya (Golkar) tidak diakui sebagai partai politik, namun diizinkan menjadi salah satu kontestan pemilu.⁶³ Setelah pengelompokan partai menemukan formatnya, maka dikeluarkanlah UU Nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya, yang menetapkan kehidupan politik di Indonesia hanya diikuti oleh dua partai politik, yaitu PPP, PDI dan satu Golkar.⁶⁴

Meskipun Orde Baru melalui Golongan Karya (Golkar) berhasil meraih suara mayoritas secara nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap mendapatkan suara mayoritas di Kecamatan Paciran dalam beberapa pemilihan umum, meskipun mengalami tren penurunan.⁶⁵ Data perolehan suara partai Islam di

⁶⁰ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Grafiti, 1997

⁶¹ Abdul Kahar Mudzakir, selain sebagai muballigh masyumi beliau juga sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah.

⁶² Sjamsudduha, *op.cit.*, hlm.61 lihat naskah hari jadi lamongan, <http://www.scribd.com/23543368/>, Naskah Riwayat Hari Jadi Lamongan.

⁶³ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan. *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya : Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2007), hlm. 20

⁶⁴ 4 UU Nomor 3 tahun 1975 (Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur)

⁶⁵ Pada pemilu 1977, PPP memperoleh suara sebanyak 31.810 suara, diikuti oleh Golkar 17.066 suara, kemudian disusul PDI dengan suara 250 suara. Pada pemilu 1982 PPP Meraup 24.225 suara, diikuti Golkar

Lamongan dan khususnya di Kecamatan Paciran menunjukkan eksistensi yang cukup besar dan berkesinambungan bagi kaum santri dalam politik. Partisipasi tokoh-tokoh dari Paciran dalam organisasi pemerintahan dan sosial turut memberikan kontribusi pada keberlanjutan peran politik mereka. Seiring runtuhnya Orde Baru dan demokrasi yang berkembang, lahirnya partai-partai baru termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), yang memiliki keterkaitan khusus dengan Muhammadiyah⁶⁶ karena diinisiasi oleh tokoh Muhammadiyah, Amien Rais. Meskipun Muhammadiyah tidak bersifat politik dan tidak dibentuk untuk mendirikan partai politik, peranannya tetap signifikan sebagai kelompok penekan (pressure group) dan anggota masyarakat sipil dalam peta politik Indonesia.

Budaya politik akomodatif telah menjadi ciri khas Muhammadiyah, dijalin dengan prinsip gerakan dan tetap dalam komitmen organisasi. Meskipun berstatus sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah mampu menjalankan peran politiknya melalui amal usaha seperti pendidikan dan kesehatan. Dampak amal usaha Muhammadiyah turut memengaruhi kebijakan pemerintah, menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan negara, Muhammadiyah berperan sebagai mitra yang melengkapi peran pemerintah. Meskipun Muhammadiyah tetap netral dalam dunia politik, hal ini tidak mengakibatkan apatis terhadap politik dan partai politik. Keberadaan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi wadah politik bagi politisi Muhammadiyah dan jalur kultural sebagai saluran partisipasi politik warga Muhammadiyah. Realitas politik ini sejalan dengan pandangan Kyai Khusnul Abid, ketua Ranting Muhammadiyah Paciran dan tokoh Muhammadiyah Paciran, yang menyatakan bahwa:

“Kita warga Muhammadiyah paciran kan sejak lama berafiliasi politik kepada Partai Amanat Nasional yang di ketua pak Prof H Muhammad Amin Rais yang juga mantan ketua umum pusat Muhammadiyah dan Muhammadiyah fatsun politiknya ya PAN dan PAN kan yang mendukung Prabowo”. (wawancara, K.H. Khusnul Abid, 29 Juni 2023)

Pernyataan kiyai Khusnul Abid menunjukkan kecenderungan yang sama dengan apa yang disampaikan dan ditegaskan oleh pak Zahrowi Syafi'i terkait pilihan politik mayoritas warga Muhammadiyah pantura Lamongan bahwa:

“Masyarakat pantura itu mayoritas PAN partainya karena Masyarakat sini tidak senang dengan PDI, banyak alasan kenapa pantura tidak suka dengan PDI pertama terkait program Pendidikan yang banyak menghilangkan Pelajaran agama dipangkas semua, jadi alasan nya adalah evaluasi program pemerintah yang diperiode 2014-2019”. (Wawancara, Zahrowi Syafi'i, 29 Juni 2023)

Relasi yang erat antara Muhammadiyah Paciran dan PAN, baik secara struktural maupun kultural, terlihat dari partisipasi aktif kader-kader Muhammadiyah dalam dunia politik melalui kendaraan politik PAN. Kolaborasi ini membawa hasil positif dengan berhasilnya dua anggota DPRD II Lamongan, satu

dengan 8.940 suara, dan disusul PDI dengan 498 suara. Pemilu 1987 PPP tetap menjadi nomor satu dengan 18.316 suara, Golkar 15.671 suara, dan PDI dengan 1.310 suara.

⁶⁶ Sulit untuk tidak berkata demikian karena faktanya PAN dilahirkan dan diketuai oleh Ketua Umum Muhammadiyah demikian juga struktur di bawahnya yakni DPW pun banyak di ketuai oleh ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, sebagai contoh DPW PAN Jawa Timur waktu kelahirannya di Ketuai Oleh KH. Abdurrohm Nor yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

anggota DPRD I Provinsi Jawa Timur, dan satu anggota DPR RI, yang semuanya merupakan kader Muhammadiyah. Sinergi yang kuat antara PAN dan warga Muhammadiyah di Paciran terbukti sukses dalam meraih suara mayoritas dalam berbagai kontestasi, termasuk Pilpres, Pilihan Legislatif, Pilihan Gubernur, dan Pilihan Bupati, yang mendapat dukungan dari PAN dan Muhammadiyah, pasti memenangkan dukungan di Desa Paciran. Contohnya terlihat pada Pemilihan Legislatif 2019, di mana Muhammadiyah Jawa Timur melalui ijtihad politik bernama Jipolmu (Jihad Politik Muhammadiyah)⁶⁷ berhasil membawa kader-kader terbaik Muhammadiyah menjadi legislator Paciran, menyumbang suara terbanyak dan memenangkan kontestasi, dengan terpilihnya anggota DPR RI, Provinsi, dan DPRD Kabupaten.

Muhammadiyah Jawa Timur ada jipolmu (Jihad Politik Muhammadiyah) maka intruksi saya melakukan dengan sungguh-sungguh saya menjabat sebagai wakil ketua daerah Jipolmu Lamongan ketuanya pak Mat Iskan, Jipolmu khusus Muhammadiyah untuk pemengan mas Najib dan pak Zainudin Maliki. (wawancara dengan aktifis politik Paciran Zahrowi Hasyim)

Meskipun secara terbuka Pimpinan Pusat Muhammadiyah membebaskan kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk memilih sesuai dengan pilihan politiknya masing-masing dan tidak ada intervensi dari struktur pimpinan akan tetapi warga dan Pimpinan Muhammadiyah Paciran dalam pilpres 2019 secara kultural warga Muhammadiyah paciran mayoritas memilih pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno sehingga mereka mendapatkan kemenangan mayoritas di Paciran.

Meskipun begitu untuk pilpres waktu itu dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak ada himbauan dimana awarah dukungan Muhammadiyah. Saya ketemu dengan Prof Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) saya tanya Muhammadiyah kemana? terserah katanya, meskipun begitu ya warga Muhammadiyah paciran dan pantura ini hampir semua atau mayoritas memilih Prabowo-Sandi. (wawancara dengan aktifis politik Paciran Zahrowi Hasyim).

Dukungan politik dari warga dan pimpinan Muhammadiyah Paciran merupakan bentuk dukungan kultural yang menjadi ijtihad dari tokoh, pimpinan, dan warga Muhammadiyah Paciran untuk memastikan bahwa suara aspirasi mereka terwakili di semua tingkatan. Hal ini dilakukan untuk mendukung gerakan dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan memberikan pendidikan politik kepada warga Muhammadiyah Paciran. Terutama dalam momentum Pemilihan Presiden, di mana pilihan ini akan menentukan calon pemimpin nasional, dukungan politik diberikan secara maksimal dengan semangat juang yang lebih tinggi. Adanya nuansa politik identitas semakin memperkuat semangat untuk memenangkan calon yang didukung. Melalui gambaran peta politik Muhammadiyah Paciran dari sisi historis hingga saat ini, terlihat bahwa sejarah pilihan politik warga Muhammadiyah Paciran selalu

⁶⁷ Jihad Politik Muhammadiyah adalah sebuah ijtihad Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk memenangkan kader yang di usung sebagai calon anggota Legislatif DPR RI dapil 10 Gresik Lamongan dimana Mengusung Prof Dr Zainudin Maliki dan calon DPD RI yakni Najib Hamid.

sejalan dengan pilihan politik tokoh, elit, dan pimpinan Muhammadiyah, mencerminkan sejarah politik yang panjang dan konsisten.

Gambaran Peta politik NU Paciran

Sejarah panjang peran politik kebangsaan Nahdatul Ulama' (NU) mencerminkan kontribusinya terhadap dinamika politik Indonesia, terbagi menjadi empat periode menurut Martin van Bruinessen.⁶⁸ Periode pertama (1926-1942) terjadi selama masa penjajahan Belanda, di mana NU masih fokus pada pengembangan dan pelestarian ajaran Islam. Periode kedua (1942-1945) terjadi selama pendudukan Jepang, di mana NU mulai terlibat dalam politik, dan anggotanya aktif di barisan Hizbullah dan Sabilillah selama perang kemerdekaan. Periode ketiga (1945-1949) terjadi dalam perang mempertahankan kemerdekaan, di mana NU terlibat aktif dalam melawan tentara sekutu dan mengeluarkan "Resolusi Jihad." Periode keempat (1949-1959) menyaksikan pelaksanaan demokrasi parlementer, di mana NU keluar dari Masyumi⁶⁹ dan menjadi partai politik pada tahun 1952, berhasil memenangkan pemilu 1955 dan membuktikan diri sebagai kekuatan politik yang signifikan. Periode kelima (1959-1965) terjadi selama masa demokrasi terpimpin, di mana NU berjuang sendirian dalam kabinet gotong royong melawan kelompok nasionalis dan komunis⁷⁰ setelah pembubaran Masyumi. Periode keenam (1965-1966) adalah masa transisi yang keras dengan penggayangan kaum komunis dan pembubaran Masyumi oleh Sukarno. Periode ketujuh (1967-1984) adalah masa Orde Baru Soeharto, di mana NU berkembang menjadi partai Ahlussunnah wal Jama'ah sebelum kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.

Dari catatan sejarah panjang dan berliku nahdatul ulama' tersebut kita bisa melihat bahwa orientasi politik NU mengembangkan, mempertahankan, menyebarkan dan melestarikan ajaran Islam yang berhaluan *ahlussunnah waljama'ah* dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Dengan demikian maka NU merupakan bagian integral masyarakat Indonesia yang tetap menginginkan tegaknya NKRI dan ajaran islam yang menganut madzhab empat, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.⁷¹

Pada awal Orde Baru, partai politik memiliki keleluasaan, namun setelah pemilihan umum tahun 1971 di mana Golkar menjadi pemenang utama diikuti oleh tiga partai besar lainnya, seperti NU, Parmusi, dan PNI, partai-partai menyadari bahwa peran mereka dalam proses pengambilan keputusan akan tetap terbatas.⁷² Pada pemilu 1971, NU menjadi partai dengan perolehan suara terbesar kedua, menunjukkan peran politik yang signifikan dari kalangan santri, mengingat Masyumi telah dibubarkan oleh rezim sebelumnya. Pada pemilu 1977, NU membubarkan diri sebagai partai politik dan kembali ke jalan dakwah, sementara Orde Baru menyederhanakan partai politik menjadi Golkar, PPP, dan PDI. Representasi politik Islam dan kaum santri diwakili oleh PPP pada pemilu 1977-

⁶⁸ Martin van Bruinessen, NU tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru, Lkis jogja, 2009.

⁶⁹ Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967. Jogjakarta: Lkis. 2009. Halaman 134.

⁷⁰ Ibid, 57

⁷¹ Jamal Ghofir. Biografi Singkat Ulama pejuang Ahlussunnah waljama'ah. Jogjakarta: Aura Pustaka. 2012. Halaman 45.

⁷² Miriam Budiardjo, DasarDasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010. Hal. 172

1997. Soeharto berusaha memenangkan Golkar dan PPP sebagai partai pemenang kedua secara nasional, termasuk di Lamongan, meskipun di desa Pacirang, PPP berhasil menjadi partai pemenang.

Pasca Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan sistem politik dari otoritarian ke demokratis, yang memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan mendirikan partai politik (parpol). Era reformasi setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada 12 Mei 1998 membawa perubahan signifikan, memungkinkan setiap kelompok membentuk parpol tanpa batasan jumlah. Pemilu demokratis dilaksanakan pada 7 Juni 1999, diikuti oleh 48 Partai Politik, dan Indonesia beralih ke era multi partai. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons aspirasi warga Nahdliyin dengan membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juni 1998 sebagai wadah untuk mengakomodasi aspirasi kaum Nahdliyin di seluruh Indonesia, meskipun proses tersebut melibatkan konflik dan usulan dari 39 parpol yang diusulkan.

Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disambut antusias oleh warga NU Paciran, Lamongan, terlihat dari perolehan suara yang signifikan di Paciran. Dukungan kuat ini berasal dari loyalitas dan totalitas warga NU Paciran dalam mendukung PKB, yang dianggap merepresentasikan suara politik Nahdlatul Ulama. Peran besar kiyai dan pesantren terlihat dalam perkembangan organisasi dan perolehan suara PKB di Paciran, seperti keterlibatan Kyai Anwar Goni sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB, yang menggambarkan keterlibatan aktif tokoh agama dalam ranah politik setempat.

Ayah saya kyai Anwar Goni Selain menjadi ketua ranting NU paciran beliau juga menjabat sebagai salah satu dewan syuro PKB kabupaten Lamongan jadi memang punya peran politik dan pengaruh politik yang cukup besar di daeran paciran ini terutama di warga nahdliyin dan para jamaah atau murid pondok pesantren mazroatul ulum.

Pengaruh kiyai dalam memengaruhi kemandirian pilihan politik warga Nahdlatul Ulama (NU) sangat signifikan, terutama dalam konteks politik identitas. Pilihan politik seseorang cenderung sejalan dengan mayoritas dalam identitas yang sama, dan identitas tersebut menjadi perekat utama dalam menentukan pilihan politik. Sebagai pemimpin kultural, kiyai memiliki otoritas besar di mata penduduk desa, menjalankan kepemimpinan yang diikuti dengan totalitas ketaatan para pengikutnya.⁷³ Kiyai dipandang sebagai otoritas yang dapat memberikan fatwa dan menjadi rujukan utama dalam menjalankan keyakinan dan praktik keberagamaan Islam di pedesaan.⁷⁴ Karena itu, dukungan yang signifikan untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Paciran, termasuk dalam pemilihan presiden 2019, dapat diatribusikan pada dukungan para kiyai dan kedekatan identitas sesama Nahdliyin yang kuat.

Pilpres 2019 ada nuansa identitas nya sangat kentara di sini identitasnya bukan islam dan non tetapi antara Muhammadiyah dan NU disini kentarnya disitu di sini seolah-olah Muhammadiyah membawa suara mayoritas ummat islam ke jalur kanan seperti mengikuti PKS. Ciri mereka

⁷³ Abdurrahman Wahid. Menggerakkan Tradisi. (Yogyakarta: LKIS Th. 2001) hal. 43-44

⁷⁴ Imam Tolkhah, Anatomi Konflik Politik Di Indonesia: Belajar Dari Ketegangan Politik VArrian Di Madukoro. (Jakarta: Raja Grafindo Persada Th. 2001) Hal. 77.

satu; mereka sangat keras dalam pendirian contoh Muhammadiyah mengharamkan tahlilan, jadi sebenarnya warga Muhammadiyah pengen tahlilan tetapi malu karena mereka cenderung berucap tahlilan haram, Muhammadiyah disini kolot seperti Jokowi dianggap tidak muslim dan anti islam jadi seolah-olah Muhammadiyah ingin memperjuangkan islam sendiri Muhammadiyah melihat Jokowi anti islam, hal ini terlihat dari ucapan-ucapan warga Muhammadiyah contoh Jokowi itu PKI, ibunya tidak Islam dan dia keturunan cina dan itu di sebutkan di mimbar-mimbar masjid termasuk masjid jamik. (wawancara dengan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Paciran Zainal Abidin).

Dari argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga Nahdatul Ulama (NU) di desa Paciran, Lamongan, memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Pilihan ini dapat dijelaskan oleh kesamaan identitas, terutama karena Ma'ruf Amin merupakan calon wakil presiden yang berasal dari kalangan NU. Menurut Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Paciran, terdapat dua alasan kuat yang mendukung mayoritas warga NU Paciran memilih Jokowi-Ma'ruf Amin.

Saya memilih Jokowi karena Pertama saya mengikuti ulama, kedua, mengikuti intruksi dari PBNU dan ulama yang waktu itu mengintruksikan seluruh warga dan pimpinan NU dan banom untuk memiliha dan memenangkan Jokowi sehingga jajaran pimpinan Nu dan banom serta warga mengikuti intruksi PBNU tersebut.

Berdasarkan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan utama pimpinan dan warga Nahdatul Ulama (NU) memilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019 adalah karena faktor organisasi dan struktur Nahdatul Ulama. Instruksi dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyuruh seluruh pimpinan dan warga NU, termasuk BANOM di semua tingkatan, untuk tidak hanya memilih, tetapi juga memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Faktor kedua adalah mengikuti ulama kiyai, khususnya Kiyai Ma'ruf Amin, yang menjabat sebagai Ra'is 'Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketaatan terhadap ulama dianggap sebagai keharusan, dan doktrin "*nderek yai*" mengajarkan ketaatan terhadap perintah ulama. Kedekatan ini dipengaruhi oleh pengkultusan dan penghormatan tinggi terhadap struktur kiyai, yang memiliki peran signifikan sebagai guru spiritual, ulama, pimpinan masyarakat, wali Allah, ahli metafisis, tabib, ahli primbon,⁷⁵ dan kebatinan dalam pandangan warga NU di Desa Paciran, Lamongan, pada pemilu 2019.

Keberadaan kesamaan identitas dalam memilih politik menegaskan bahwa itu dapat menjadi kekuatan penggerak dan penyatuan yang kuat untuk mendukung calon yang diusung. Agnes Heller melihat politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang memberikan fokus pada perbedaan sebagai kategori utama dalam ranah politik.⁷⁶ Walaupun sebuah komunitas memiliki ideologi dan tujuan

⁷⁵ Rojabi Azharghany, "Konstruksi Sosial Terhadap Kiai Dalam Tradisi Air Doa Dan Amalan." (Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun. 2016).

⁷⁶ Ubed Abdillah. *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas* (Magelang, Indonesiatera, 2002), hal: 16.

bersama, kenyataannya terdapat beragam individu dengan kepribadian dan identitas yang berbeda. Dalam teori politik identitas, yang diuraikan oleh Lukmantoro, politik ini bertujuan untuk menonjolkan kepentingan anggota kelompok berdasarkan kesamaan identitas atau karakteristik, termasuk ras, etnis, jenis kelamin, dan agama. Oleh karena itu, politik identitas dapat diartikan sebagai formulasi politik perbedaan.⁷⁷

Dari uraian di atas, tergambar dengan jelas peta politik di Desa Paciran, yang mencerminkan perbedaan pilihan politik antara warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam persaingan ini, keduanya berupaya keras untuk memengaruhi warga Paciran melalui praktik politik, baik dengan melibatkan struktur organisasi maupun melalui pendekatan kultural. Praktik politik ini dilakukan dengan harapan dapat memengaruhi pemilih agar memilih sesuai dengan keinginan agen dan struktur yang terlibat. Hal ini menjadi penting untuk memenangkan calon yang diusung oleh kekuatan masing-masing. Sebagai contoh, upaya untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Paciran dan pesisir utara Lamongan, terutama mengingat mayoritas warga Paciran adalah Muhammadiyah, yang mayoritas mendukung calon lain. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ketua Ansor Paciran.

Meskipun saya tahu mas warga paciran ini mayoritas pasti akan memilih Prabowo-Sandi dan Jokowi – ma'ruf amin pasti kalah disini karena disini Muhammadiyah mayoritas akan tetapi saya tetap ikut dalam struktur pemenangan Jokowi-ma'ruf amin karena kalau tidak saya sebagai ketua anshor disini siapa lagi makanya saya kampanye semaksimal mungkin untuk mendapatkan suara. (wawancara dengan Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Paciran Zainal Abidin)

Pelibatan struktur dan agent yang terkoordinasi dengan baik dengan memanfaatkan semua potensi yang ada baik jaringan, kekeluargaan, pengaruh, kharisma, Historis serta ketersediaan logistic yang cukup menjadi sangat penting untuk memenangkan.

Meskipun warga muhammadiyah paciran ini rasional dalam berfikir mas tetapi warga Muhammadiyah paciran adalah warga yang ideologis dalam urusan organisasi dan cenderung mengikuti arahan para pemimpinnya apalagi terkait dengan pilihan politik sehingga meskipun pada pilpres kemarin tidak ada arahan khusus dari pimpinan pusat muhammadiyah tanpa diarahkan secara otomatis mereka sudah tahu bahwa arah dukungan mayoritas warga Muhammadiyah ke Prabowo karena kita sudah punya pengalaman serta sejarah yang panjang mas . (Wawancara dengan ketua Pimpinan ranting Muhammadiyah Paciran KH. Khusnul Abid)

Relasi historis yang telah melibatkan warga Muhammadiyah Paciran selama kurun waktu yang cukup panjang, dengan segala dinamikanya, membentuk landasan pandangan politik mereka baik di tingkat nasional maupun lokal. Faktor-faktor seperti ideologi, keadilan, ekonomi, penegakan hukum, dan dukungan terhadap

⁷⁷ Triyono Lukmantoro, *Kematian Politik Ruang* (Jakarta: Kompas, 2008).

perjuangan umat Islam menjadi penentu dalam pembentukan preferensi politik mereka. Peranan sejarah, bersama dengan faktor-faktor lainnya, memegang peran signifikan dalam membentuk kemandirian pilihan politik warga Muhammadiyah Paciran. Dinamika sejarah di desa Paciran Lamongan, yang mencakup identitas dalam berbagai konteks politik dari tingkat lokal hingga nasional, menunjukkan bahwa praktik politik identitas telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, dan intensitasnya terus berkembang dengan berbagai dinamika. Oleh karena itu, praktik politik identitas yang muncul pada Pilpres 2019 tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan kelanjutan dari kontestasi sebelumnya, di mana persaingan dan dominasi pengaruh antara identitas NU dan identitas Muhammadiyah terus membentuk jurang perbedaan di antara keduanya.

Sejarah telah mencatat kontribusi besar dari kedua organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam pembangunan sumber daya masyarakat desa Paciran. Usaha-usaha yang melibatkan pesantren, sekolah, madrasah, hingga rumah sakit, yang diinisiasi oleh keduanya, semakin memperkuat pengaruh struktur mereka baik yang terikat oleh ruang dan waktu maupun yang tidak. Sejarah panjang keduanya menegaskan bahwa peran historis memiliki dampak besar dalam praktik-praktik politik identitas. Oleh karena itu, sumber daya struktur yang terikat dalam ruang dan waktu, yang selama ini dianggap otoritatif dan alokatif, perlu didekonstruksi.

Pengaruh historis juga memainkan peran penting dalam membentuk struktur untuk terlibat dalam praktik-praktik politik. Dengan demikian, pilihan politik masyarakat Paciran tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya struktur yang terikat dalam ruang dan waktu, seperti aturan-aturan dan norma, tetapi juga oleh sejarah yang memiliki signifikansi, dominasi, dan legitimasi sebagai pembenaran dalam praktik-praktik politik identitas, yang bertujuan membangun kemandirian pilihan politik individu. Realitas ini menunjukkan bahwa sejarah memainkan peran krusial dalam mereproduksi dan memproduksi praktik-praktik politik identitas, dan oleh karena itu, sejarah menjadi satu dari banyak sumber daya struktur yang terikat dalam ruang dan waktu.

Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat kita simpulkan Pertama, sejarah panjang pertarungan antar identitas telah terjadi sejak lama di Desa Paciran Lamongan dan perbedaan pilihan identitas tersebut terjadi dari satu kontestasi ke kontestasi yang lain sehingga produksi dan reproduksi praktik politik identitas terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama oleh karena itu maka historitisa punya peran yang cukup signifikan dalam membangun dan memperkuat praktik politik identitas untuk memengkan calon yang di usung oleh masing-masing identitas. Kedua, pertarungan antar identitas telah terjadi dan akan terus diproduksi oleh para agent dan struktur yang ada dalam masyarakat paciran lamongan untuk memenangkan calon yang dikung dalam berbagai macam kontestasi yang terjadi karena dengan argumentasi kesamaan identitas akan sangat membantu proses mobilisasi pemilih atas nama identitas yang sama.